

DAFTAR PUSTAKA

- Apriliansa, R. (2017). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam mewujudkan Good Governance*. Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- BPKP. (2016, November 17). *Membangun Good Governance Menuju Clean Government*. Dipetik oktober 03, 2022, dari Warta Pengawasan: www.bpkp.go.id.
- Darmiasih, N. K. (2015). Analisis Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD). *Jurnal Accountability*, 01-06.
- Desa, D. J. (2016, Desember 07). *Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri*. Dipetik Oktober 05 , 2022, dari No. 113 Tahun 2014.: www.djpk.kemenkeu.go.id
- Diansari, R. E. (2015). *Analisis Implementasi Alokasi Dana Desa(ADD) Kasus Seluruh Desa Di Kecamatan Keledung Kabupaten Temanggung Tahun 2013*. Yogyakarta: Universitas PGRI.
- Hehamahua, H. (2015). Impact Analysis of the Village Fund Allocation (ADD) Toward Economic Community (Case Study on the Rural District of Namlea Siahoni), Buru Regency. *Journal of Social and Development Sciences*, 15-23.
- ilyas, R. (2019). *Pengelolaan alokasi dana desa (add) dalam mewujudkan good governance di desa bone kecamatan bajeng kabupaten gowa*. makasar: Universitas muhammadiyah .
- Indonesia, R. (2017, Republik Indonesia. 2016. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 22 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017. Jakarta.Sekretariat Negara.). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 22 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Krina, L. L. (2003). *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta: Bappenas.
- Kurniati, P. N. (2017, Desember 10). *Dana Desa Sebagai Instrumen Pembangunan Daerah*. Dipetik Oktober 13 , 2022, dari Universitas Indonesia: www.jos.unsoed.ac.id
- Latif, A. P. (2011). *Dinamika Good Governance di Tingkat Desa di Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Tahun 2011*. Yogyakarta : Seminar Nasional Universitas PGRI .
- Masihad, A. (2018). *Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Marga Ayu Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal Tahun 2017*. Semarang: UIN Walisongo.
- Oktaresa, B. (2015). Analisis Hubungan Pengalaman, Pengetahuan Mendeteksi Kecurangan, dan Skeptisme Profesional Dengan Kemampuan Pendeteksian Kecurangan Pada Perwakilan BPKP Provinsi Riau. *Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Akuntansi Negara Tangerang Selatan*, 04-07.

- RI, D. J. (2019, juli 7). *Kebijakan Dana Desa TA 2016*. Dipetik Oktober 08 , 2021, dari 2016: www.djpk.kemenkeu.go.id
- RI, D. J. (2019, November 2). *Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2019*. Dipetik Oktober 08 , 2021, dari www.djpk.kemenkeu.go.id
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumiati. (2015). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi. *E-Jurnal Katalogis*, 135-142.
- Supriadi, E. (2015). Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadil*, 02-03.
- Tiwinarni. (2017). *Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Akuntabilitas Publik Terhadap Persepsi Masyarakat Tentang Kualitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Se-Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali*. yogyakarta.
- Ulfa, N. (2018). *Implementasi Prinsip Good Governance dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah.
- Warsono, H. d. (2014). The Obstacles of Implementation of Village Allocation Fund Program in the North Konawe Southeast Sulawesi. *Journal of Management and Sustainability*, 4-3.
- Widiyanti, A. (2017). *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Sumberejo dan Desa Kandung di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan)*. Malang: UIN Maliki.